



## BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1. Visi

Berdasarkan uraian mengenai kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara, masalah, peluang dan tantangan pembangunan ke depan maka visi pembangunan kami dalam membangun Sulawesi Tenggara periode Tahun 2013-2018 adalah :

#### **MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 – 2018**

Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut :

Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu provinsi yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), seperti pertambangan. Sumberdaya yang tersedia, seharusnya memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga memungkinkan terjadinya kemandirian daerah.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lima tahun ke depan, periode 2013-2018, akan terus dilakukan upaya-upaya konkrit berupa peningkatan nilai tambah sumberdaya alam agar terwujudnya **kesejahteraan, kemandirian dan daya saing** masyarakat dan daerah ini.

**Kesejahteraan** mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedang **sejahtera** yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun.

**Kesejahteraan sosial** dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang adil, makmur dan merata. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya secara terencana terarah dan berkelanjutan untuk melindungi dan memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak dan bermartabat, terutama untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dengan demikian kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara layak dan bermartabat.

**Mandiri** mengandung makna tidak adanya ketergantungan pada orang lain, mampu mengembangkan kemampuan “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya sehingga mampu berdaulat secara politik, hukum dan ekonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemandirian sosial bukan berarti hidup sendirian namun hidup mandiri adalah hidup yang berusaha untuk tidak menjadikan orang lain merasa terbebani dengan kehidupan kita. Kehidupan mandiri bukan berarti kehidupan yang terpisah dengan masyarakat dan daerah lain namun kemandirian yang dimaksud disini adalah berusaha untuk bisa berfikir lebih dewasa mengenai arti kehidupan sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara lebih berdaya dan bangga atas kemampuan diri sendiri. Mandiri juga mengandung



makna sebagai bentuk pembelajaran untuk menuju proses pendewasaan dalam berpikir. Belajar untuk tidak tergantung dalam hal apapun meski saat dalam kondisi yang tidak memungkinkan masih bisa dibantu pada saat mendapat kesulitan. Dengan demikian mandiri mengandung pengertian sikap cerdas, kreatif, disiplin, dan inovatif.

Sulawesi Tenggara adalah daerah yang kaya akan sumberdaya alam dan memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam konteks visi pembangunan Sulawesi Tenggara, kemandirian yang dimaksud adalah terciptanya kemampuan putra-putri dan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memproduksi, mengolah dan menghasilkan produk dengan teknologi tinggi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dengan berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional.

**Daya Saing** adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Sulawesi Tenggara bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community*. Daya Saing juga mengandung makna memiliki kemampuan dan atau kekuatan, adalah satu kemampuan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Tenggara maka produk yang dihasilkan harus dapat unggul secara kualitas, efisien proses produksi dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan maka MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya konkrit berdasarkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas, dengan mengutamakan pendekatan yang bertumpu pada pembangunan manusia (*people centred*), pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (*growth centred development*) dan pengembangan kawasan tumbuh cepat serta pembangunan yang inklusif, berkelanjutan (*sustainable development*) serta mengarusutamakan gender (*Gender Mainstreaming*).

Sebagaimana diketahui bahwa melalui beberapa pendekatan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pendahulu, maka secara visual Sulawesi Tenggara bukanlah termasuk provinsi yang tertinggal, karena beberapa komoditas yang berasal dari Sulawesi Tenggara telah dikenal di pasar nasional bahkan di pasar internasional. Beberapa infrastruktur penting seperti bandara, pelabuhan kontener, rumah sakit telah terbangun dengan kualifikasi tinggi. Tetapi di lain pihak harus juga diakui bahwa ada beberapa sektor yang masih perlu dikembangkan agar dapat mengejar ketertinggalan atau menyamai provinsi lainnya yang telah berkembang.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, telah memberikan manfaat dalam pengembangan daerah dan juga pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu periode pembangunan Sulawesi Tenggara 2013 - 2018, merupakan periode untuk **MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 – 2018**

## **5.2. Misi**

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia,
2. Pembangunan Ekonomi,
3. Revitalisasi Pemerintahan Daerah,
4. Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta,
5. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.

Secara singkat maksud pelaksanaan Misi/Agenda Utama Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;** dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta iman dan taqwa. Dalam mengisi otonomi daerah, peningkatan



kualitas SDM (sumber daya manusia) mutlak diperlukan, terlebih dalam menghadapi era globalisasi khususnya perdagangan bebas di kawasan ASEAN 2003 dan di kawasan asia pasifik 2020, yang diwarnai dengan persaingan yang ketat dan menentukan jati diri suatu bangsa diantara bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan manajemen pendidikan yang produktif. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing pada lapangan kerja yang ada. Lulusan pendidikan semestinya memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja, sehingga mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor sehingga dapat menghasilkan perubahan pada diri manusia.

- b. **Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil dan meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada di sekitarnya.
- c. **Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.
- d. **Pembangunan Kebudayaan;** dimaksudkan untuk memperkuat identitas dan jati diri, mengembangkan rasa perasatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat.
- e. **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis;** dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul perekonomian serta pembangunan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing maka pemerintah Sulawesi Tenggara akan tetap melaksanakan program utama Bangun Kesejahteraan Masyarakat atau BAHTERAMAS dengan 3 program pokok yaitu Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan, Pengobatan Gratis dan Pemberian Dana *Block Grant* dan Bantuan Keuangan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan konsep reposisi BAHTERAMAS, maka beberapa penekanan dalam pelaksanaan program pokok adalah sebagai berikut:

1. Program pokok Pembebasan Biaya Operasioanal Pendidikan akan tetap pada kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013, dengan memfokuskan kepada Program Cerdas Sultraku dalam periode tahun 2013-2018.
2. Program Pengobatan Gratis akan tetap dilaksanakan layanan pengobatan individu sampai dengan rawat inap kelas III seperti yang dilakukan pada periode Tahun 2008-2013 dengan memfokuskan pemberian dana *Block Grant* kepada Puskesmas untuk melayani pasien miskin dalam wilayah kerjanya.
3. Bantuan keuangan bagi kecamatan, kelurahan dan desa tetap menyediakan dana administrasi bagi pemerintahan desa sedang dana BPR akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Selebihnya dana *Block Grant* ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan klaster ekonomi sesuai tupoksi SKPD yang bersangkutan.



### 5.3. Tujuan dan Sasaran

#### 5.3.1. Misi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

**Tabel 126. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Misi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8.25	8.44	8.51	8.61	8.72	8.82
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.71	91.52	91.83	92.13	92.77	93.05
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80.94	82.36	83.43	84.45	85.23	85.7
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C	72.78	66.47	67.4	68.5	69.23	73.45
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	118.94	121.45	122.25	122.75	122.95	123.45
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	101.45	107.86	107.95	107	108.1	108.45
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C	94.09	98.47	98.5	98.95	99	99.1
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	46.12	48.97	53.73	56.78	61.14	65.83
		Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	92.00	92.60	92.70	92.90	93.10	93.40
	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat	69.53	85.00	100	100	100	100
		Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	98.52	99.23	99.00	99.79	100	100
		Angka Kelulusan	94.08	94.25	94.44	94.61	94.77	94.94
	Meningkatnya akreditasi PAUDNI, SD, SMP, SMA	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	40.19	44.35	47.57	50.58	53.45	56.26
		Persentase SD berakreditasi minimal B	31.28	34.42	38.50	42.25	46.50	50.45



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Persentase SMP berakreditasi minimal B	22.59	25.37	37.80	39.50	32.45	35.50
		Persentase SMA berakreditasi minimal B	50.23	53.30	54.64	56.25	58.42	60.45
		Persentase SMK berakreditasi minimal B	28.75	31.56	33.75	35.40	37.25	39.30
	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.4	70.6	70.8	71.0	72.0	72.3
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	12.6	10.2	10.0	9.0	7.7	6.6
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	71	58	50	48	42	37
		Angka Kematian Anak (1-5 tahun) per 1000 kelahiran hidup	48	48	43	43	32	32
		Prevalensi Balita kekurangan gizi (persen)	20.6	19.0	17.4	15.8	14.2	12.6
	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	233.2	231.4	229.6	227.8	224.0	221.0
		Prevalensi HIV (persen)	<0,01	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
		Kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) per 1.000 penduduk	1.8	1.6	1.4	1.2	1	<1
		Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	54.2	53.4	52.6	51.8	51.0	50.2
	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	0	5	5	5	5	5
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan mini lokakarya program	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan	84.0	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0
		Cakupan kunjungan neonatal lengkap	85.1	86.3	90.0	90.0	90.0	90.0

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 bulan	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Desa Siaga Aktif	52.5	66.3	80.0	85.0	90.0	90.0
		Rasio Ketersediaan Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	4.0	4.2	4.5	5.0	6.0	6.0
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah Akseptor KB	413,279	414,231	417,423	420,224	421,006	423,563
		Cakupan Alkon bagi keluarga miskin	60	65	70	75	80	85
		Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%/tahun)	2.20	2.19	2.00	1.60	1.59	1.49
		Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	3.0	2.8	2.7	2.4	2.3	2.2
Meningkatkan kualitas iman dan takwa	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1
Meningkatkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66.90	67.82	68.82	69.83	70.83	71.83
		Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	64.49	65.29	66.09	66.89	67.69	68.48

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



### 5.3.2. Misi Pembangunan Ekonomi

**Tabel 127. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Misi Pembangunan Ekonomi**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	<b>Ketersediaan pangan (Ton)</b>						
		Beras	43.500	30.447	65.718	70.318	75.241	80.507
		Jagung	56.300	60.241	64.458	68.970	73.798	78.964
		Kedelai	5.200	5.564	5.953	6.370	6.816	7.293
		Kacang Tanah	4.300	4.515	4.831	5.169	5.531	5.918
		Kacang Hijau	1.100	1.155	1.236	1.322	1.415	1.514
		Ubi Kayu	160.000	171.200	183.184	196.007	209.727	224.408
		Ubi Jalar	20.000	21.400	22.898	24.501	26.216	28.051
		Daging	18.942	20.027	21.815	23.779	25.970	28.383
		Telur	9.815	11.161	12.712	14.502	16.572	18.969
		Ikan	927.700	995.800	1.201.900	1.458.000	1.775.300	2.170.600
	Meningkatnya cadangan pangan	Tingkat penguatan cadangan pangan (%)	50	55	60	70	80	85
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah (%)	70	75	80	85	90	95
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan (%)	50	55	60	65	70	75
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Unggulan Daerah	Meningkatnya produksi komoditi unggulan	<b>Jumlah produksi (Ton)</b>						
		Kakao	185.201	213.619	230.659	247.628	264.596	281.564
		Kelapa Dalam	30.047	66.671	73.783	80.895	88.006	95.118
		Jambu Mete	25.882	27.156	29.957	32.758	35.559	38.360
		Cengkeh	9.415	14.636	16.779	18.922	21.065	23.208
		Lada	4.405	7.112	7.642	8.173	8.703	9.233



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Rumput Laut	639.192	917.362	1.050.269	1.183.176	1.316.083	1.448.990
		Fero Nikel	15.535	16.851	17.868	18.885	19.902	20.919
		Aspal	583.830	275.290	338.900	402.509	466.119	529.728
	Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri	Nilai komoditi perdagangan antar pulau (trilyun rupiah)	6	7	9	10	11	6
		Nilai ekspor (ribu US\$)	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	600.000
	Meningkatnya infrastruktur kelistrikan	Tambahan kapasitas pembangkit (MW)	43	93	-	25	45	28
		Tambahan kapasitas gardu induk (KMS)	802	410	-	80	-	80
		Tambahan kapasitas transmisi (MVA)	183	90	-	60	60	21
	Meningkatnya industri kecil dan menengah besar	Jumlah industri kecil	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	15.000
		Jumlah industri menengah dan besar	250	300	350	400	450	250
Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha	Meningkatnya usaha koperasi dan UMKM serta wirausaha baru	Presentase kewirausahaan yang kompetitif (%)	17	9	1	23	32	18
		Daya saing UMKM (%)	2	1	36	45	10	5
		Presentase kelembagaan koperasi yang kompetitif (%)	28	33	2	2	31	4
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (Rp)						
		PMDN (Triliyun)	5	6,5	7,5	8	9	9,5
		PMA (Triliyun)	7	9,5	11,5	13,5	16	17,5
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%)	35,83	37,13	39,30	39,50	40,20	40,50
	Meningkatnya akses pembiayaan	Jumlah Bank Umum	187	253	254	255	260	260
		Jumlah BPR	15	16	17	18	20	21
	Meningkatnya kelembagaan	Jumlah LEM	52	55	60	65	70	75

BAB V-8

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja	masyarakat petani	Jumlah Gapoktan	2.365	2.455	2.545	2.635	2.725	2.815
	Meningkatnya promosi daerah	Jumlah pameran	7	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (%)	142,78	147,06	161,76	173,09	185,21	196,32
		Nilai Tukar Nelayan (%)	109,27	110,02	110,07	112,30	112,50	114,40
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	65,79	66,87	73,04	73,27	73,5	73,74
		Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,45	4,43	4,41	4,39	4,37	4,38
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (persen)	100	100	100	100	100	100
		Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (persen)	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan pertambangan	Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (%)	25,47	25,64	25,80	26,25	26,50	27,10
		Pertumbuhan sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	21,93	25,64	22,30	21,50	22,15	23,60
	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditangani (Ha)	4.000	4.000	3.626	2.790	2.309	4.000
		Pembentukan unit KPH	2	2	2	2	2	2
	Meningkatnya pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisata (orang)	3.377	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		Jumlah objek wisata	270	290	300	310	320	330

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



### 5.3.3. Misi Revitalisasi Pemerintahan Daerah

**Tabel 128. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Misi Revitalisasi Pemerintahan Daerah**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat, serta bersih dari praktek-praktek, korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif	Jumlah kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan, badan usaha milik desa dan pasar desa serta peningkatan kapasitas SDM aparatur dan menejerial pemerintahan desa/kelurahan yang mendapat bantuan	250	250	250	250	250	250
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Penilaian akuntabilitas keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	B	B	B	B	B	B
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta pelaksanaan kegiatan pembangunan	5	5	5	5	5	5
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah	Persentase penurunan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal	75%	70%	65%	60%	55%	50%
		Jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	169	166	130	83	94	94
	Meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penegakan Perda	85%	90%	95%	95%	100%	100%
	Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta sistem	Tercapainya aparatur pemerintah daerah yang disiplin	90%	90%	95%	95%	100%	100%



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	promosi dan rekrutmen pegawai	Persentase peningkatan Kualitas SDM dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Politik dan Suprastruktur Politik	Jumlah bintek penguatan lembaga legislatif yang didukung dengan sarana dan prasarana yang baik	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Meningkatnya sistem pengawasan isi siaran	Persentase penyelenggaraan Sistem Pengawasan Isi Siaran pada Lembaga Penyiaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya peran DPRD dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	Jumlah Ranperda Inisiatif Daerah	3	3	5	5	5	5

### 5.3.4. Misi Pembangunan Kebudayaan Daerah

Tabel 129. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Misi Bidang Pembangunan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan penguatan kearifan lokal	Menguatnya budaya dan tradisi lokal	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	20	25	30	35	40
		Jumlah seni budaya lokal yang dikembangkan (sanggar)	45	70	90	120	125	140
		Jumlah koleksi museum yang direvitalisasi	2	4	6	8	9	10
		Jumlah lembaga adat	1	2	3	4	4	5

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



**5.3.5. Misi Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.**

**Tabel 130. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Misi Bidang Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan strategis untuk kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi darat, laut dan udara	Panjang jalan Provinsi (km)	906,09	906,09	906,09m	1014,95	1014,95	1014,95
		Jumlah jembatan baru	1 buah	3 buah	6 buah	10 buah	15 buah	20 buah
		Jalan provinsi kondisi mantap	56%	59%	62%	64%	66%	68%
		% jalan kondisi mantap pada kawasan strategis	26%	34%	40%	45%	50%	55%
		% jumlah jembatan dalam kondisi mantap	66%	72%	78%	86%	90%	90%
		Arus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (Ribuan Orang)	810,5	610,75	810,9	811	811,2	811,2
		Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (Ribuan Orang)	24.596	25.196	25.796	26.396	26.996	26.996
		Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (Ribuan Orang)	811,38	828,07	844,76	861,45	878,14	878,14
		Arus Keberangkatan dengan Transportasi Darat (Ribuan Orang)	24.339	24.899,62	25.340	25.840,83	26.341,44	26.341,44
		Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut (Ribuan Ton)	128,61	131	133,4	135,8	138,2	138,2
		Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Darat (Ribuan Ton)	245.003,98	250.043,24	255.082,5	260.121,75	265.161	265.161
		Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut (Ribuan Ton)	138,02	141,52	145,01	148,51	152	152
		Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Darat (Ribuan Ton)	242.913,33	247.442,62	251.971,92	256.501,22	261.030,51	261.030,51
		Arus Kedatangan dengan Transportasi Udara (Ribuan Orang)	276	281,86	287,54	293,2	298,9	298,9
		Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (Ribuan Orang)	242,18	247,17	252,15	257,13	262,12	262,12



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton)	2.343,12	2.477,35	2.706,66	2.935,96	3.165,26	3.165,26
		Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton)	2.164,58	2.289,7	2.535	2.780,35	3.025,67	3.025,67
		Arus Kedatangan dengan Transportasi Laut (Ribu Orang)	1.976	2.178,53	2.390,89	2.629,97	2.892,97	2.892,97
		Arus Keberangkatan dengan Transportasi Laut (Ribu Orang)	1.980,58	2.178,64	2.396,5	2.636,15	2.899,77	2.899,77
		Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton)	1.669,86	1.836,84	2.020,53	2.222,58	2.444,84	2.444,84
		Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton)	1.051,36	1.156,5	1.272,15	1.399,36	1.539,3	1.539,3
		Jumlah terminal angkutan	10	12	12	14	14	16
		Jumlah penyeberangan laut/sungai	13	14	14	15	15	16
		Jumlah pelabuhan laut	13	14	14	15	15	16
		Jumlah pelabuhan udara	7	7	7	7	7	7
		Rasio Jumlah Trayek Terhadap Jumlah Penduduk	60 : 2.206.844	60 : 2.206.844	63 : 2.295.389	67 : 2.295.389	70 : 2.339.662	75 : 2.383.934
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Daerah Persawahan, Rawa, dan Pertambakkan						
		- Sawah	39000 Ha	40000 Ha	41000 Ha	42000 Ha	43000 Ha	43000 Ha
		- Tambak	26000 Ha	27000 Ha	28000 Ha	29000 Ha	30000 Ha	30000 Ha
		- Rawa	51800 Ha	52800 Ha	52800 Ha	53800 Ha	54800 Ha	54800 Ha
		% Luas Daerah Teririgasi dalam Kondisi Baik	71%	77%	83%	88%	93%	95%
		Luas Daerah Teririgasi	54.000Ha	59.000Ha	64.000Ha	69.000Ha	79.000Ha	79.000Ha
		Penyediaan Air Baku	6 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	11 lokasi	13 lokasi	15 lokasi
		% Luasan Daerah yang Membutuhkan Irigasi Terlayani	32%	34%	36%	38%	40%	42%
		Penanganan Sungai Berpotensi Banjir	36 lokasi	45 lokasi	54 lokasi	62 lokasi	70 lokasi	78 lokasi

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Pengamanan Pantai	35 lokasi	40 lokasi	45 lokasi	50 lokasi	55 lokasi	60 lokasi
		Penyediaan Bendung Baru Untuk Energi Listrik Tenaga Air	0	0	0	0	1 unit	1 unit
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	% Layanan Jaringan Air Minum	65%	68%	70%	73%	75%	77%
		Layanan Sistem Air limbah Setempat	70%	72%	74%	76%	78%	80%
		Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	1%	2%	3%	3,5%	4%	4,5%
		Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan	5%	9%	13%	16%	18%	20%
		% Sistem Penanganan Sampah Perkotaan	32%	42%	51%	59%	65%	70%
		% Layanan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Kota	26%	32%	37%	42%	46%	50%
		% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	5%	6,5%	8%	9,5%	10%	10,7%
		% Pembangunan Gedung Pemda Sesuai Standar dan Kriteria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Pembangunan Sarana Fasilitas Umum Daerah Sesuai Standar dan Kriteria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	14%	19%	23%	27%	32%	35%
		% Bantuan Stimulan Perumahan	66,19%	68%	71%	73%	75%	79%
		Lingkungan Sehat yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	69%	72%	74%	76%	78%	79,75%
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Tersedianya database pembangunan infrastruktur	30%	45%	60%	80%	100%	100%
		Tersedianya perencanaan teknis infrastruktur	8%	15%	20%	25%	30%	35%



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi	2 kali/thn	10 kali/thn	10 kali/thn	10 kali/thn	10 kali/thn	10 kali/thn
		% Ketersediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	30%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Pembinaan Jasa Konstruksi Di Daerah	25%	100%	100%	100%	100%	100%
Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan cepat tumbuh	Jumlah Perda RTRW	10	12	14	16	16	16
		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Dievaluasi BKPRD Provinsi	2	2	3	5	7	8
		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Diperdakan	0	0	1	>2	>5	>5
		% Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Untuk Kawasan Strategis	40%	60%	70%	80%	100%	100%
		Ketaatan terhadap RTRW (%)	30	40	50	60	70	80
		Luas wilayah produktif (ha)	2.062,714.66	2.062,714.66	2,165,850.39	2,274,142.91	2,387,850.06	2,507,242.56
		Luas Wilayah Industri (ha)	550	550	605	665.5	732.05	805.255

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



#### **5.4. Pendekatan Pembangunan**

Secara umum dalam pembangunan lima tahun ke depan akan dilakukan tiga strategi dan pendekatan pembangunan yaitu :

##### **5.4.1. Pembangunan yang bertumpu pada manusia**

Pembangunan yang berfokus pada masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimilikinya, melalui prinsip-prinsip pembangunan manusia yaitu :

**Produktivitas** : masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

**Ekuitas** : masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

**Kesinambungan** : akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia dan lingkungan hidup harus dipenuhi.

**Pemberdayaan** : pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

##### **5.4.2. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan**

Pembangunan diarahkan pada **kawasan strategis**, yang akan menjadi kawasan strategis tumbuh cepat. Dilakukan berdasarkan potensi wilayah dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang terukur, termasuk membangun simpul-simpul ekonomi/tataniaga untuk menghimpun komoditas/produk dalam skala ekonomi dengan memanfaatkan kebijakan desentralisasi fiskal.

##### **5.4.3. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**

Pembangunan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan produksi dan pendapatan masyarakat.

##### **5.4.4. Pembangunan yang bertumpu pada pengarus-utamaan gender**

Merupakan strategi pembangunan yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan proses pembangunan di semua bidang pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan penganggaran yang lebih efisien dan berkeadilan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata serta tepat sasaran bagi seluruh penduduk Sulawesi Tenggara baik laki-laki maupun perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki.